



**KEDUDUKAN HUKUM BAGI PEMERINTAH DALAM
KONTRAK PENGADAAN BARANG DAN JASA**

SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Menyelesaikan Studi
Pada Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih*

Oleh :

VENTY ERLAN NIKIJULUW
NIM.2020022014003

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS CENDERAWASIH
JAYAPURA
2024**

PERSETUJUAN

Skripsi ini telah disetujui
pada tanggal, 30 Mei 2024

Oleh :

Pembimbing I



Prof. Dr. Eddy Pelupessy, S.H., M.Hum
NIP. 19590723 198903 1 001

Pembimbing II



Daniel Tanati, S.H., M.H.
NIP. 19730429 200212 1 001

Mengetahui :

Ketua Bagian Hukum Perdata



Daniel Tanati, S.H., M.H.
NIP. 19730429 200212 1 001

PELAKSANAAN UJIAN

Skripsi ini telah diuji
Pada tanggal, 30 Mei 2024

TIM PENGUJI

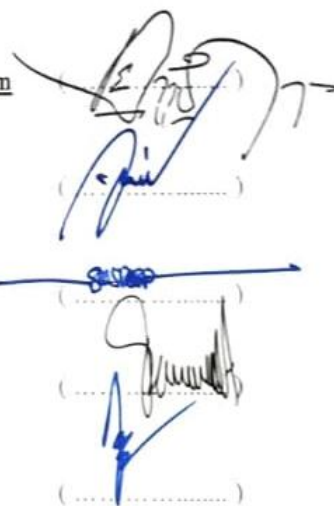
Ketua/Anggota Prof. Dr. Eddy Pelupessy, S.H., M.Hum
NIP. 19590723 198903 1 001

Sekretaris/Anggota Daniel Tanati, S.H., M.H.
NIP. 19730429 200212 1 001

Anggota Dr. Yustus Pondavar, S.H., M.H.
NIP. 19730619 200312 1 001

Anggota Dahlia Ketaren, S.H., M.H.
NIP. 19780527 200112 2 003

Anggota James Yoseph Palenewen, S.H., M.H.
NIP. 19820420 200812 1 004



ABSTRAK

Penelitian dengan memilih judul “Kedudukan Hukum Bagi Pemerintah Dalam Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa”, dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui kedudukan hukum bagi pemerintah dalam kontrak pengadaan barang dan jasa serta pembebanan tanggunggugat pemerintah dalam pelaksanaan kontrak pengadaan barang dan jasa.

Tipe penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, yaitu mengkaji konsep-konsep hukum terkait dengan kontrak pada umumnya dan kontrak komersial pada khususnya. Dalam hal ini yang menjadi objek dalam penelitian ini berkaitan dengan status dan wewenang pemerintah dalam kontrak pengadaan barang dan jasa.

Hasil penelitian mengungkapkan bahwa kadang-kadang pemerintah terlibat dalam lalu lintas pergaulan keperdataan dalam kedudukan yang sama dengan pihak swasta sebagaimana dalam kontrak pengadaan barang dan jasa, tanpa kedudukan spesifikasinya sebagai institusi untuk melindungi kepentingan umum. Pembebanan tanggunggugat pemerintah dalam pelaksanaan kontrak pengadaan barang dan jasa dapat ditinjau dari dua segi dalam hal tindakan pemerintah sebagai salah satu pihak dalam kontrak pengadaan barang dan jasa yaitu perbuatan yang melekat pada lembaga pemerintahan maupun pribadi (individu) aparatur pemerintahan, sehingga dapat dimintakan pertanggung jawaban berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdato. Oleh sebab itu, panitia lelang/tender dan atau pejabat yang berwenang dalam mengeluarkan keputusan baik dalam pembuatan kontrak pengadaan barang dan jasa maupun dalam pelaksanaan kontrak tersebut harus didasarkan pada nilai-nilai dasar atau prinsip-prinsip adil dan bertanggung jawab secara rasional.

Kata Kunci : Kedudukan hukum Pemerintah, Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa.

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO : “Iktikad Baik dan keseimbangan kepentingan merupakan manifestasi dari pelaksanaan suatu kontrak”

(Venty E. Nikijuluw)

PERSEMBAHAN :

Karya tulis yang sederhana ini Kupersembahkan kepada :

1. Orang tua terkasih Bapak Ocktovianus Nikijuluw dan Ibu Sartje Pattiwael.
2. Istri tercinta Selmi Makagiansar.
3. Anak-anak tersayang Vlanchio George Seiquayah Nikijuluw dan Teresyah Miranda Nikijuluw.
4. Almamater Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan Tuhan Yang maha Esa atas berkat rahmat dan ridho-Nya, penulisan skripsi ini dapat terselesaikan.

Makna yang terkandung dalam rumusan pembahasan materi penulisan skripsi ini pada dasarnya merupakan refleksi pemahaman yang penulis peroleh dari para pengajar, perpustakaan dan interaksi edukatif dengan almamater Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih serta perangkat pendukung lainnya.

Dengan mengacu pada perspektif inilah, secara khusus dalam pengambilan keputusan, penulis memperhatikan kapabilitas dan memper-hitungkan aspek bidang studi, keterbatasan energi, kapasitas ilmu pengetahuan yang penulis miliki serta urgensi-urgensi dan aktualitas masalah pada obyek penelitian melalui fase pembangkitan motivasi, pemahaman, serta kreasi sebagai upaya optimalisasi menuju wawasan pemahaman di bidang penerapan serta pengembangan hukum dalam masyarakat.

Jika selesainya skripsi ini dianggap suatu keberhasilan, maka hal itu merupakan realitas bahwa telah banyak pihak yang ikut berperan serta, sehingga dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Dr. Oscar Oswald Wambrau, S.E., M.Sc., Agr. selaku Rektor Universitas Cenderawasih Jayapura.
2. Bapak Prof. Dr. Frans Reumi, S.H., M.A., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih.

3. Bapak Daniel Tanati, S.H., M.H. Ketua Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih sekaligus sebagai Dosen Pembimbing II yang mengarahkan penulis hingga penulisan skripsi ini dapat diselesaikan tepat pada waktunya.
4. Bapak Prof. Dr. Eddy Pelupessy, S.H., M.Hum selaku Dosen Pembimbing I yang telah meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan dan arahan selama penulisan skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih yang telah bekal penulis dengan ilmu pengetahuan di bidang hukum selama menempuh studi di Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih.
6. Segenap Staf Dosen Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih yang dengan sabar telah memberikan ilmunya yang telah membekali penulis dalam menyelesaikan studi dan penulisan Skripsi ini.
7. Segenap staf Administrasi Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih yang dengan tulus dan sabar memberikan layanan administrasi akademik kepada penulis.
8. Tim Penguji yang sangat pro aktif dalam memberikan koreksi dan nilai positif terhadap materi penulisan skripsi ini.
9. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan namanya, namun telah memberikan sumbangan pikiran dan dorongan sehingga penulisan skripsi ini dapat dirampungkan.

Dengan menyadari sepenuhnya akan keterbatasan penulis baik dari segi penguasaan materi maupun metode penulisannya, maka dalam konteks

penyempurnaan skripsi ini berbagai saran dan kritik yang konstruktif dan membangun sangat penulis harapkan. Dan kiranya segala budi baik yang telah diberikan kepada penulis, mendapat balasan dari Tuhan Yang Maha Kuasa.

Jayapura, 30 Mei 2024

Penulis

VENTY ERLAN NIKIJULUW
NIM.2020022014003

DAFTAR ISI

JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
ABSTRAK	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	15
C. Tujuan Penelitian.....	15
D. Manfaat Penelitian.....	16
E. Metode Penelitian.....	16
BAB II KERANGKA TEORI	
A. Prinsip-Prinsip Hukum Kontrak	21
B. Prinsip Perlindungan Hukum	45
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Kedudukan Hukum Pemerintah Dalam Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa	52

B. Pembebanan Tanggungugat Pemerintah Dalam Pelaksanaan	
Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa.....	55
BAB IV	PENUTUP
A. Simpulan.....	61
B. Saran.....	61
DAFTAR PUSTAKA	